



## ADOPSI SISTEM PERPARKIRAN KOTA BATAM

# Pansus Usul Jukir Digaji APBD

**YOGYA (KR)** - Persoalan pelanggaran tarif parkir yang kerap dikeluhkan masyarakat, menjadi pertimbangan utama panitia khusus (pansus) Raperda Perparkiran Kota Yogya. Pansus pun melontarkan usulan agar juru parkir (jukir) mendapat gaji dari APBD serta penerapan tarif parkir berlangganan.

Ketua Pansus Raperda Perparkiran, Antonius Fokki Ardiyanto, mengaku usulan tersebut merupakan hasil sharing dengan sistem perparkiran di Kota Batam. "Kebetulan Kota Batam juga tengah merumuskan regulasi perparkiran. Di sana sudah menyepakati jukir yang digaji dari APBD dan diberlakukan karcis berlangganan selama satu tahun," urainya, Jumat (31/3).

Jika pendapatan jukir sepenuhnya berasal dari Pemkot Yogya, imbuh Fokki, maka sepenuhnya harus patuh aturan pemerintah. Sehingga, jika ada oknum yang nuthuk tarif parkir, maka tidak hanya proses pembinaan yang diberikan melainkan dapat langsung dipecat oleh Pemkot.

Diakui, akibat ulah oknum jukir yang memungut tarif parkir di atas ketentuan selalu menjadi persoalan klasik dan selalu berulang. Di samping itu, sikap jukir yang

tidak ramah juga memperburuk citra pariwisata di Kota Yogya. "Usulan ini akan kami konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri serta Mabes Polri," tandasnya.

Sementara itu dari sisi retribusi, tidak dapat dipungkiri parkir menjadi salah satu sumber dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogya. "Berkaca pada Kota Batam, dengan penerapan tarif parkir berlangganan, daerah tersebut berani memasang target PAD parkir sebesar Rp 30 miliar di tahun ini. Padahal, realisasi tahun 2016 lalu hanya mencapai Rp 3,6 miliar," ungkapinya.

Teknis penerapan tarif parkir berlangganan pun dapat melibatkan kepolisian. Terutama dengan diikutkan dalam setiap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Namun ketentuan teknisnya harus didasari dengan nota kesepakatan atau MoU dengan ke-

polisian. "Kebijakan tarif parkir berlangganan selain meningkatkan PAD parkir juga untuk menekan kebocoran. Sudah banyak kasus jukir yang tidak memberikan karcis resmi untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya," urai Fokki.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya, Wirawan Haryo Yudo, menilai perlu ada kajian mendalam dalam pemanfaatan APBD untuk menggaji jukir. Meski begitu, dirinya menyambut baik usulan pansus lantaran persoalan parkir memang harus dibenahi secara total.

Hingga saat ini, terdapat 900 jukir yang mendapatkan surat tugas dari Dinas Perhubungan. Setiap enam bulan, surat tugas tersebut dilakukan perpanjangan setelah ada proses pembinaan. Sedangkan pendapatan daerah dari jasa parkir pada 2016 lalu mencapai Rp 1,6 miliar.

"Kami tunggu rumusan akhir dari pansus, termasuk usulan itu apakah akan diakomodir dalam perda atau tidak. Tapi tidak semua parkir di bawah Dinas Perhubungan melainkan ada yang di UPT Malioboro serta UPT Pengelolaan Pasar," jelasnya. (Dhi)-m

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005